

## Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Muh. Taqwin Tahir, Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[muh.taqwin.mtt@gmail.com](mailto:muh.taqwin.mtt@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mempunyai pokok masalah yaitu bagaimana Peran Organisasi Kemasyarakatan antara Syarikat Islam (SI) dan Front Pembela Islam (FPI) dalam perkembangan hukum Islam Indonesia. Dari pokok masalah itu kemudian di urai menjadi 3 sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Sejarah Perkembangan SI dan FPI di Indonesia ?, 2) Bagaimana Bentuk Pemikiran Hukum Islam SI dan FPI ?, 3) Bagaimana kontribusi Serikat Islam dan FPI Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dan komparasi. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik kutipan. Selanjutnya analisis data menggunakan metode kualitatif yang di interpretasi dengan menggunakan tehnik berfikir Induktif (pengolahan data dari umum ke khusus), dan juga tehnik berfikir Deduktif (pengolahan data dari khusus ke umum), serta tehnik berfikir Komperatif (membandingkan pemikiran atau pendapat para pakar satu dengan yang lain). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua organisasi ini yaitu antara SI dan FPI, walaupun kedua organisasi masing masing berlandaskan pada akar yang sama yaitu Islam namun dalam interpretasinya terhadap Islam mempunyai bentuk berbeda, baik dari segi pemikiran maupun dari segi perilaku, dan juga kedua organisasi ini tentu mempunyai peran dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia itu bisa kita lihat dari kontribusi kedua organisasi tersebut dalm menyikapi permasalahan-permasalahan keagamaan yang sedang terjadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Syarikat Islam, Front Pembela Islam, Organisasi Kemasyarakatan, Hukum Islam

### Abstrac

*This research has a main problem, namely how The Role Of Social Organizations between the Islamic Syarikat (SI) and the Islamic Defenders Front (FPI) in the development of Indonesian Islamic law. From the main problem, then it is broken down into 3 sub-problems, namely: 1) How is the History of the Development of SI and FPI in Indonesia?, 2) What is the Form of Islamic Legal Thought SI and FPI?, 3) How is the contribution of Islamic Union and FPI to the Development of Islamic Law In Indonesia, this research uses a type of library research which is descriptive analytic and comparative. The data collection in this study is using library techniques. The data collection methods used were literature techniques and citation techniques. Furthermore, data analysis uses qualitative methods which are interpreted by using Inductive thinking techniques (data processing from general to specific), as well as Deductive thinking techniques (data processing from specific to general), as well as Comparative thinking techniques (comparing the thoughts or opinions of one expert with one another). The results of this study explain that these two organizations are between SI and FPI, although the two organizations are each based on the same root, namely Islam, but in their interpretation of Islam they have different forms, both in terms of thinking and behavior, and also these two organizations of course. We can see that they have a role in the development of Islamic law in Indonesia from the contribution of the two organizations in addressing religious issues that are happening in Indonesia.*

**Keywords:** Syarikat Islam, Islamic Defenders Front, Community Organization, Islamic Law

### Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Ini dapat ditelusuri pada masa awal Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam perkembangan hukum Islam di

<sup>1</sup> Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazhabuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

Indonesia tak terlepas dari pengaruh dari organisasi kemasyarakatan (selanjutnya di singkat Ormas) yang berbasis Islam, mulai dari pra kemerdekaan sampai sekarang ini. Lebih dari itu ormas Islam juga sangat mempengaruhi tata politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam.<sup>2</sup> Bagi penulis menarik untuk menjadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebab mengingat bahwa perlunya perhatian khusus untuk menjelaskan apa yang ada dan menentukan posisi ormas bagi umat Muslim dan Syariat Islam lebih lanjut.

Serikat Islam (SI) dan Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas yang berasaskan Islam, walaupun dalam kemunculan kedua ormas ini sangat jauh dalam kurun waktu, yang dimana punya alasan dalam konteks sejarah masing-masing. Sehingga jelaslah adanya perbedaan yang sangat radikal dalam visi misi perjuangan masing-masing organisasi.<sup>3</sup> SI dibentuk pada saat kolonialisasi masih ada, sehingga SI hadir yang dulunya bernama Serikat Dagang Islam (SDI) merupakan upaya baru dan pertama bagi umat Islam walaupun hanya aspek ekonomi saja tetapi sangat menentukan perjuangan nasional Indonesia. SI yang awalnya bertujuan menopang kegiatan para pedagang Muslim dalam menghadapi persaingan dengan orang Tionghoa dan Eropa. Merosot dan muncul kembali sebagai organisasi pribumi pada tahun 1920. Selain itu SI juga terbentuk karena kebutuhan mendesak membangun kembali Hindia dengan jalur modernisasi.

Sedang FPI lahir bersamaan dengan naiknya Habibie menjadi presiden setelah presiden Soeharto mengundurkan diri. FPI didirikan tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-53, tanggal 17 Agustus 1998, bertempat di Pesantren Al-Umm Ciputat Jakarta Selatan pimpinan K.H. Misbahul Anam, yang dideklarasikan oleh Habib Muhammad Rizeq Syihab.<sup>4</sup> FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Lemahnya kondisi penegakkan hukum dan pemerintahan pada awal pelaksanaan reformasi di tahun 1998, dimanfaatkan oleh sekelompok “mafia”, yang terdiri dari LSM-LSM yang berupaya merusak negara melalui cara sistematis dengan menyebarkan berbagai macam kemunkaran. Hal itulah yang mendorong para ulama, *habaib*, dan kiai begitu antusias untuk mendirikan suatu organisasi *amr ma'ruf nahi munkar*.

Menurut Thoha Hamin, munculnya gerakan radikal Islam di Indonesia, terutama FPI, dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan militan yang terjadi di Timur Tengah dan negara-negara lain. antara lain: *Jabhat al-Tahrir al-Falastini* di Palestina, *Palestini Libration Front* (PLF) di Palestina, *Moro National Libration Front* (MNLF) di Philipina, Pasukan Ababil, dan Laskar Jundullah di Jakarta, yang mana organisasi tersebut bergerak secara militan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah penguasa.

## Metodeologi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dan komparasi.<sup>5</sup> Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik kutipan. Selanjutnya analisis data menggunakan metode kualitatif yang di inerpretasi dengan menggunakan tehknik berfikir Induktif (pengolahan data dari umum ke khusus), dan juga tehknik berfikir Deduktif (pengolahan data dari khusus ke

---

<sup>2</sup> Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.

<sup>3</sup> A. Qodry Azizy, “*Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahnya di Indonesia*”. (Diktat, Semarang Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1982), h. 30.

<sup>4</sup> Jajang Jahroni dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.23.

<sup>5</sup> Muammar Bakry et al., “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwā,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–2765.

umum), serta teknik berfikir Komperatif (membandingkan pemikiran atau pendapat para pakar satu dengan yang lain).

## **Pembahasan**

### **Sejarah Perkembangan Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Di Indonesia**

#### **1. Sejarah Perkembangan Syarikat Islam**

Lahirnya SDI berawal dari persaingan dagang antara penduduk pribumi dengan penduduk Cina peranakan. Kemajuan yang sangat pesat dapat di capai oleh orang-orang Cina dalam hal perdagangan kain dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap kalangan pribumi, sehubungan dengan revolusi Sun Yat Sen tahun 1911 yang menimbulkan perasaan tinggi hati mereka, dan tak lupa, keahlian mereka dalam memonopoli harga kain batik, semakin menambah kejengkelan para pedagang pribumi, sehingga merasa sangat dirugikan sekali dengan adanya peristiwa tersebut. Keberhasilan kalangan Cina dalam menguasai dunia perdagangan, yang selanjutnya mendapat dukungan dari Belanda dalam melancarkan usaha-usaha mereka sehingga mereka dapat mendirikan perkumpulan Tionghoa Hwee Koan pada tahun 1900 di Jakarta yang bergerak dibidang pendidikan serta membentuk kamar-kamar dagang dikota-kota besar di Indonesia. Aktifitas mereka menjadi semakin meningkat setelah adanya gerakan pembebasan yang terjadi di Cina padatahun 1901.<sup>6</sup> Keberhasilan tersebut telah menjadikan sikap angkuh penduduk Cina dengan memandang rendah terhadap kedudukan rakyat Indonesia. Kenyataan ini kemudian mendorong didirikannya Sarekat Dagang Islam (SDI).

SDI adalah organisasi yang didirikan di Solo oleh seorang saudagar batik dari desa *Laweyan*, kabupaten Solo yang bernama H.Samanhoedi, pada tahun 1905 dengan nama awal Sarekat Dagang Islam (SDI). *Laweyan* adalah salah satu pusat terpenting kerajinan batik Indonesia, suatu industri yang dalam abad kesembilan belas berhasil menyaingi kerajinan tekstil Eropa. Suatu sebab penting keberhasilan ini adalah ditemukannya metode cap, dengan metode ini dapat tercapai banyak sekali peningkatan hasil produksi. Selain itu, berdasarkan selera, rakyat Indonesia tetap lebih menyukai batik pribumi daripada hasil-hasil tiruan dari Eropa.<sup>7</sup>

SDI merupakan gagasan dari R.M. Tirtoadisoerjo, pelopor lahirnya perkumpulan pedagang Sarekat Dagang Islamiyah (SDI). Dapat dimungkinkan dalam salah satu upayanya menjual saham-saham usaha barunya kepada para pengusaha Indonesia yang mampu, Tirtoadisoerjo pun berkenalan dengan H. Samanhoedi. H. Samanhoedi memintanya agar menjadi pemimpin redaksi harian *Sarotomo* yang segera akan diterbitkan oleh perkumpulan baru itu di Semarang. Barangkali sempat pula ia memberi nasihat-nasihat cara menangani perkumpulan Samanhoedi yang baru, mungkin dengan menggunakan cara ini ia mengharapkan dapat memperoleh modal baru untuk usahanya sendiri di Bogor, yang pada awal 1911 berada dalam keadaan pailit. Nama Sarekat Dagang Islam (SDI) mungkin sekali diambil oleh Samanhoedi dari nama usaha dagang Tirtoadisoerjo. Kerja sama antara Samannhoedi dan Tirtoadisoerjo hanya berlaku singkat.

Perkembangan berikutnya Sarekat Islam yang memiliki dasar Islam dan ekonomi ini mengembangkan organisasinya dengan berusaha mencari bantuan kepada seorang yang bernama H.O.S Tjokroaminoto, untuk bekerjasama pada tahun 1912 dan pada tahun itu pulalah Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). Pada periode awal perkembangannya SI merupakan suatu hal yang besar dalam arti bahwa massa dapat dimobilisasi serentak secara besar-besaran, baik dari kota besar maupun daerah pedesan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Roeslan A. Ghani, *Politik dan Ilmu* (Jakarta:Yayasan Prapanca, 1902), h. 44.

<sup>7</sup>A.P.E Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 11.

<sup>8</sup>Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Perrgerakan Nasionaldari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, vol. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 107.

Sejak empat tahun didirikan keanggotaan nya telah mencapai hampir dua setengah juta, dan program kebangsaannya yang militan benar-benar dibuktikan untuk memperoleh kemerdekaan penuh, kalau perlu dengan kekerasan.<sup>9</sup>

Pada penghujung 1920-an, SI sebagai katalisator pergerakan nasional sedikit mulai memudar. SI pada saat itu mengalami kegagalan dalam mempertahankan kepeloporannya untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, idealisme dan aktivisme politiknya dibayang-bayangi kelompok-kelompok politik social lain yang tidak secara formal menyatakan Islam sebagai dasar ideologinya. Merosotnya peran SI ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor utamanya adalah ketidak mampuan para pemimpin SI dan aktivisnya mengatasi berbagai perbedaan paham di antara mereka, khususnya yang berkaitan dengan soal arah politik SI, terutama setelah Marxisme dibawa masuk ke ranah organisasi, dari sinilah pertarungan ideologi antara pendukung politik Islam konvensional *vis a vis* kelompok yang cenderung beraliran ideologi Marxisme dan Nasionalis sekuler di mulai. Perpecahan ini pada periode selanjutnya melahirkan kelompok nasionalis-sekuler yang mayoritas lebih muda dan terdidik secara barat.

Sejak semakin aktif di ranah politik dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan nasional, SI kemudian beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu; 1) Central Sarekat Islam (CSI) pada tahun 1916; 2) Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1923; 3) Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada tahun 1927; 4) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1928 sampai tahun 1973; 5) PSII kemudian melakukan fusi partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 sampai tahun 1998.<sup>10</sup>

Setelah mengalami perpecahan dan rekonsiliasi, PP SI yang dulu dipimpin oleh Taufik R. Tjokroaminoto memutuskan SI untuk kembali ke khittah pada penyelenggara-an Majelis Taklim (MT) ke-40 SI di Bandung pada tahun 2015. Kembali ke khittah maksudnya adalah SI kembali menjadi organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi. Dengan kata lain, ada keinginan untuk menjadikan SI sebagai organisasi yang menghidupkan dagang dan wirausaha di kalangan umat Islam. Penyelenggaraan MT itu juga memilih Hamdan Zoelva sebagai ketua umum.<sup>11</sup>

## **2. Sejarah Perkembangan Front Pembela Islam**

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Indonesia yang mengusung pandangan Islamisme konservatif. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di Indonesia.<sup>12</sup> Latar belakang berdirinya FPI tak lepas dari ketika terjadinya proses reformasi. Dimana dalam proses reformasi suasana kekuasaan yang ada tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, setiap kelompok dapat secara bebas memperjuangkan dan mengekspresikan kepentingannya, sekalipun harus bertentangan dengan aturan hukum. Konflik sosial yang diwarnai dengan tindak kekerasan terjadi dimana-mana, mulai dari Aceh, Ambon, Poso, hingga Sanggau Ledok-Pontianak. Ada semacam tindakan balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat terhadap negara dan juga terhadap kelompok sosial lainnya yang dianggap sebagai bagian dari negara. Reformasi merupakan arus balik gerakan sosial, dari dominasi kekuasaan negara ke kekuatan rakyat.

Oleh karena tidak ada situasi yang kondusif, yakni tiadanya proses sosialisasi dan konsolidasi yang memadai, terjadinya arus balik ini tidak menyebabkan timbulnya iklim

<sup>9</sup>George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*(Surakarta: UNS Press, 1995), h. 85.

<sup>10</sup>Hanifah, "Perjuangan Sarekat Islam Dalam Melawan Kolonialisme Belanda di Sumenep Madura 1913-1920". *Skripsi*. (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), h. 75.

<sup>11</sup>Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto dan Ahmad Rofik, "Gerakan Syarikat Islam Kembali Ke Khittah Tahun 1905", *Jurnal Politik Profetik*8, no. 2 (2020), h. 220.

<sup>12</sup>Wikipedia, "Front Pembela Islam" [https://id.wikipedia.org/wiki/Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam)

sosial politik yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi dan justru sebaliknya, menjadi ajang balas dendam yang melahirkan konflik dan kekerasan sosial. Masing-masing kelompok saling berebut kepentingan dengan menjadikan reformasi dan demokrasi sebagai legitimasi bagi tindakan mereka masing-masing. Sekelompok masyarakat yang pada masa Orde Baru yang merasa ditindas dan dirampas hak-haknya serta diperlakukan secara tidak adil oleh Negara, pada era reformasi mereka bangkit dan melakukan perlawanan untuk merebut kembali hak-hak mereka yang terampas. Sebaliknya, kelompok yang dulunya menjadi bagian dari Negara berusaha menggunakan proses reformasi semaksimal mungkin untuk menghilangkan jejak dengan cara menyamar menjadi pejuang reformasi dan demokrasi.

Umat Islam, merupakan bagian terbesar dari bangsa ini, merasa bahwa reformasi adalah momentum yang sangat tepat merebut posisi penting dalam kekuasaan. Sebab, selama Orde Baru, umat Islam yang mayoritas justru hanya menjadi korban pembangunan, tanahnya diambil secara paksa untuk pembangunan, hak-hak politiknya dibatasi karena dianggap mengganggu stabilitas, dan geraknya pun selalu dicurigai. Selama pemerintahan, Orde Baru, seluruh kekuatan politik strategis, seperti pemegang kebijakan (policy) sektor ekonomi dan bisnis, selalu dikuasai oleh etnis Cina atau orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap umat Islam.<sup>13</sup>

Ketika reformasi terjadi, sebagian umat Islam menggalang kekuatan untuk mengambil peran politik yang lebih strategis. Bagi kelompok Islam jenis ini, reformasi merupakan peluang untuk merebut kembali hak-hak mereka yang dirampas oleh Negara. Dengan hilangnya kekuatan Negara dan aparaturinya, umat Islam memiliki kesempatan untuk menawarkan nilai-nilai Islam sebagai alternatif untuk menjawab problem bangsa tanpa harus khawatir dicurigai dan dituding sebagai kelompok ekstrim kanan (kelompok fundamentalis) yang harus diberangus.

Akhirnya, sekelompok umat Islam yang memiliki perhatian terhadap masalah ini pun berkumpul dan melakukan konsolidasi untuk mengefektifkan kegiatan mereka dengan cara membentuk Front Pembela Islam (FPI). Dari situ kemudian berdirilah FPI. Kelompok ini berdiri secara resmi pada 17 Agustus 1998, di pondok pesantren Al-umm, Kampong Utan, Ciputat Jakarta Selatan. FPI didirikan oleh sejumlah Haba'ib, ulama, mubalig, serta aktivis muslim dan umat Islam. Tokoh yang mempopulerkan berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab.<sup>14</sup>

## **Bentuk Pemikiran Syarikat Islam dan Front Pembela Islam**

### **1. Bentuk Pemikiran Syarikat Islam**

#### **a. Konsep Sosialisme Syarikat Islam**

Perkataan “Sosialisme” awalnya dari perkataan bahasa latin “socius” maknanya dalam bahasa Belanda: maker, dalam bahasa Melayu: teman, dalam bahasa Jawa: kita, dan dalam bahasa Arab: sahabat atau asyraf.<sup>48</sup> Istilah ini dikenal pada abad 19 dan mendapatkan banyak simpatikan, sebab konsep sosialisme ini merupakan reaksi daripada kezaliman dari sistem kapitalisme.

Konsep Sosialisme merupakan paham yang berasal dari budaya intelektual dari barat yang berkat dari kolonialisme sehingga berpengaruh juga terhadap kaum terpejajar dan juga masyarakat Indonesia, tak terkecuali juga terhadap Syarikat Islam. Namun konsep sosialisme Syarikat Islam berbeda dari konsep barat, yang menganggap lebih cenderung berdasar pada barang-barang benda belaka atau ke rana materil, sehingga berefek kepada kepercayaan-kepercayaan terhadap agama semakin menurun.

Pandangan sosialis dari barat itu, meskipun merupakan sebuah upaya untuk melepaskan

<sup>13</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999), H.87

<sup>14</sup>H.O.S Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, (Djakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indoneisa, 1963), h. 15

diri dari bentuk eksploitasi dari aspek ekonomi, sosial maupun politik. Akan tetapi upaya itu juga mengarah kepada paham ateisme, sikap tidak percaya kepada tuhan, pengingkaran terhadap prinsip-prinsip agama, yang dimana hal itu dilakukan dengan maksud bahwa ingin memperlakukan kelas buruh secara adil dan objektif tanpa doktrin yang keluar dari ajaran dari prinsip-prinsip sosialisme terutama ajaran agama.

b. Konsep Agama dan Sosialisme Syarikat Islam

Lawan daripada konsep sosialisme adalah individualisme (egoisme). Individualisme atau egoisme merupakan paham yang mementingkan untuk kebutuhan pribadi, dengan tidak memperdulikan hak dan keperluan orang lain. Jika egoisme sudah merasuki pergaulan sistem kehidupan masyarakat maka, kehidupan sosial juga akan rusak. Ketika hal itu telah terjadi maka dapat dipastikan akan timbul sifat kikir yang berlebihan, nafsu mengejar keperluan dan kesenangan untuk diri sendiri, perbuatan sewenang-wenang, dan akhirnya terjadi ketidakteraturan atau anarkis.<sup>15</sup>

Dan bagi Tjokroaminoto upaya-upaya untuk menghindari nafsu yang berlebihan itu adalah agama. Sosialisme dalam hal ini harus berdasar kepada kepercayaan terhadap agama. Kalau pikiran dan tindakan manusia tidak didasarkan kepada kepercayaan agama, maka sosialisme akan tersesat dan akan membawa kerusakan bagi manusia.<sup>16</sup>

c. Konsep Sosialisme Dalam Islam

Dasar utama dari konsep Sosialisme Islam yaitu “*kaanaan nasu ummataan wahidan*” yang artinya, “umat itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan)”. Selain dari itu untuk mempertegas konsep Sosialisme Islam Tjokroaminoto kemudian menjelaskan ayat Al-Quran, bahwa “Allah telah menghilangkan kecongkakan dan kesombongan diatas asal keturunan yang tinggi. Seorang Arab tidak mempunyai ketinggian atau kebesaran yang melebihi orang asing, melainkan barang apa yang telah diyakini bagi dia karena takut dan baktinya kepada Tuhan, ini menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah sama.

## 2. Bentuk Pemikiran Front Pembela Islam

a. Konsep Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Islam

Amar berasal dari kata *amara*-ya “*muru-amran*” yang secara bahasa dapat diartikan dengan kata menyeru atau menyeruh. Sedangkan *Al-Ma'ruf* berasal dari kata “*arafa*-ya “*rifu-ma'rufan*”, “*alima*-ya “*lamu-*”, *ilman*” artinya kebajikan atau perkara yang diketahui sebagai kebajikan. *Nahi* berasal dari kata *naha-yanha-nahyan* artinya mencegah atau melarang pada sesuatu. *Al-munkar* berasal dari kata *ankara-yunkiru- inkaran-munkaran* artinya perkara buruk atau ditolak.<sup>17</sup>

Umat muslim hendaknya menyeruh kepada hal-hal yang baik. dengan mengingat bahwa tujuan agama adalah agar umat Islam mampu menjaga akidah (hifdzud diin), akal (hifdzud aql), jiwa (hifdzun nafs), harta (hifdzud maal), dan keturunan (hifdzun nasl).<sup>18</sup> Sehingga mampu untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak agamis. Mengutip Muammar Bakry Syariah adalah aturan Ilahi yang membimbing manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan.<sup>19</sup>

b. Konsep Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Pandangan Front Pembela Islam

Tujuan utama dari FPI adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Amar ma'ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut syara' dan hukum akal. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah setiap kejahatan/kemunkaran, yakni setiap perkara

<sup>15</sup>Nasihin, *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*, h. 147.

<sup>16</sup>H.O.S Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, h. 116.

<sup>17</sup>Habib Muhammad Riziq Shihab, *Dialog FPI: amar ma'ruf nahi munkar*, h.119.

<sup>18</sup>Budimansyah, “Gerakan Islam Jama'ah Tabligh dalam Tinjauan Maqashid al-Din”. *Jurnal Al-Adalah*, No. 3, (Januari 2012), h.255.

<sup>19</sup>Muammar Bakry, dkk, *Konstruksi Islam Moderat “Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanis, dan Universalitas Islam”*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang kata, Januari 2018, h. 50.

yang dianggap buruk oleh syara' dan hukum akal. Selain itu' tunduk pada syariat Islam dan tunduk pada hukum negara selama tidak berbenturan dengan ajaran Islam. Sehingga, bila menghadapi peraturan dan undang-undang negara yang bertolak belakang dengan syariat Islam, maka FPI dalam perjuangannya akan berusaha untuk menyiasatnya sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum negara, sambil terus berjuang merubah segala ketentuan hukum yang sesat lagi menyesatkan menuju kearah yang lebih Islami. Dan ini adalah kewajiban.<sup>20</sup>

Dalam pola pemikiran FPI seperti diatas sudah menjadi suatu inspirasi dari berbagai doktrin dan tujuannya yang pasti membawa kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat, maka dari itu pemikiran hukum Islam seperti ini diharapkan mampu menjawab segala persoalan hidup yang dihadapi umat manusia.<sup>21</sup>

c. Konsep Amr Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Penegakannya

Sesuai dengan pola perjuangan FPI, maka mekanisme perjuangan amar ma'ruf nahi munkar FPI yang diletakkan organisasi adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Pengambilan keputusan berdasarkan syariat islam, untuk mengambil suatu keputusan, terlebih lagi yang berhubungan dengan gerakan fisik amar ma'ruf nahi munkar, seperti melakukan tindakan tegas terhadap sarang ma'siat, maka FPI harus mengkaji terlebih dahulu dalam Laboratorium Syari'at, yang dikelola oleh para ahli secara ilmiah dan profesional dibawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber Ijtihad lainnya.
- 2) Pelaksanaan putusan dengan menempuh prosedur hukum formal negara terlebih dahulu, ini dalam rangka menghindari jebakan melawan hukum negara untuk memelihara kesinambungan perjuangan organisasi, khususnya menyangkut gerakan fisik dalam melawan kemunkaran
- 3) Penggunaan dan pemanfaatan kekuatan umat saat prosedur menemui jalan buntu pada saat prosedur jalur hukum formal negara menemui jalan buntu, dan penegakkan amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak bisa tidak harus segera dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan telah dilakukan dengan cermat sesuai syariat Islam, maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen umat.

## **Kontribusi Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Terhadap perkembangan Hukum Islam Di Indonesia**

### **1. Syarikat Islam**

#### **a. Bangkitnya Semangat Nasionalisme Muslim Indonesia**

Lahirnya Nasionalisme di Indonesia merupakan akibat dari kedatangan kolonial Belanda yang menjadikan Indonesia sebagai objek jajahan tujuannya tidak lain mengembangkan kapitalisme dan imperialisme yang berakibat bangsa Indonesia menjadi rugi dalam semua bidangbaik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>23</sup>

Soraya Rasyid dan Annisa Tamara mengatakan dalam tulisannya bahwa usaha SI dalam pergerakan nasional di Indonesia dapat diketahui dari berbagai segi upayanya dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dilakukan SI untuk meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia dalam upaya tersebut menumbuhkan dan meratakan kesadaran nasionalisme.

<sup>20</sup> Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 86.

<sup>21</sup> Achmad Musyahid, "Perkembangan Pemikiran Filsafat Dalam Jurisprudensi Islam" *Jurnal Hukum Diktum*8, no. 1 (Januari 2010), h. 47.

<sup>22</sup> Habib Muhammad Riziq Shihab, *Dialog FPI: amar ma'ruf nahi munkar*, h.242-243.

<sup>23</sup> Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 107.

- 2) Gerakan aspirasi rakyat dalam menuntut hak-haknya sebagai suatu bangsa serta berpartisipasi didalam pemerintahan.
- 3) Membangun persatuan dan kekuatan nasionalisme dalam upayanya mempertahankan semangat dan kesatuan usaha didalam perjuangan pergerakan nasional.<sup>87</sup>

*Pertama*, upaya membangun kembali kesadaran bangsa akan harga dirinya sebagai rakyat Indonesia dan sebagai suatu bangsa yang seharusnya memiliki pemerintahan sendiri agar dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam upaya ini SI ikut serta dalam berusaha meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia melalui perjuangannya dibidang ekonomi, sosial, politik dan keagamaan.<sup>24</sup> Mengusahakan perbaikan pendidikan serta praktek kehidupan beragama yang sesuai ajaran Islam kepada rakyat Indonesia kegiatan tersebut Sarekat Islam juga bermaksud memperbaiki segi moral rakyat Indonesia yang karena akibat penjajah mengalami kemerosotan seperti, tertanamnya jiwa membudak, rendah diri dan takut membela yang seharusnya menjadi hak-hak pribumi. para pemimpin Sarekat Islam menganggap tugasnya yang paling utama adalah untuk menyadarkan rakyat terhadap hak-haknya yang dilindungi oleh pemerintah, Terhadap ketidakadilan<sup>25</sup> dan kesewenang-wenangan<sup>14</sup>, melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Sarekat Islam menjadi pusat pembelaan rakyat yang pertama lahir di Indonesia, di dalamnya berkumpul anggota dari bermacam-macam status sosial dan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, pandangan serta berbagai harapan yang ingin diperoleh melalui Sarekat Islam mematangkan diri dalam kesatuan keanggotaan Sarekat Islam.

*Kedua*, Upaya Sarekat Islam berikutnya yaitu mengemukakan segala sesuatu yang dirasakan dan diinginkan oleh rakyat dalam memperoleh kembali hak-haknya sebagai suatu bangsa serta keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan di Indonesia kesemuanya itu dihimpun dan kemudian dibahas oleh para pemimpin Sarekat Islam dan selanjutnya diajukan kepada pemerintah Kolonial Belanda agar diperhatikan ataupun dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap segala sesuatu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Hal ini dilaksanakan dikarenakan Sarekat Islam begitu percaya terhadap maksud baik pemerintah sehubungan dengan dilakukannya politik etis, sehingga Sarekat Islam kelihatannya juga mau bekerjasama dengan pemerintah untuk mengadakan perbaikan kehidupan rakyat pribumi Indonesia.<sup>26</sup> Sarekat Islam dengan kongres-kongresnya merupakan kekuasaan tertinggi Dalam organisasi tersebut dan sejak tahun 1916 kongres tersebut disebut dengan kongres nasional Central Sarekat Islam, yang berupaya menghimpun berbagai aspirasi dan keinginan rakyat tentang segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya yaitu berupa keluhan maupun harapan dan juga dibicarakan berbagai macam-macam masalah mulai dari ekonomi sampai politik.<sup>27</sup>

*Ketiga*, Sarekat Islam berusaha mendudukan posisi rakyat yang sebenarnya dalam Volksraad serta fungsinya dalam pemerintah sehubungan dengan adanya dewan rakyat yang hanya sebagai sandiwara belaka<sup>91</sup>, tidak berfungsi sebagai lembaga legislatif tetapi hanya mempunyai kekuasaan memberi nasehat atau saran kepada pemerintah usaha, itu dikemukakan melalui mosinya yang diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918 yang didukung sepenuhnya oleh segenap golongan di kalangan pergerakan.

Dari ketiga upaya itu memberikan hasil bagi perkembangan awal nasionalisme di

<sup>24</sup>Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 107.

<sup>25</sup>Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 107.

<sup>26</sup>Moh. Yusuf, "Sarekat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia", *Skripsi*, (Surabaya Fak. Adab IAIN Sunan Ampel, 1987), h. 83

<sup>27</sup>Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia*. h.114



Indonesia, bahwa *pertama*, perhatian SI terhadap masalah-masalah rakyat Indonesia memberikan rasa bahwa mereka diperhatikan, dilindungi, dan diperjuangkan. Adanya perasaan tersebut memberikan kesadaran rakyat bahwa kondisinya yang masih terkebelakang karena bentuk kolonialisme, hal itu membangkitkan kembali semangat perjuangan dalam memperbaiki taraf kehidupannya dan bertahap menuju kepada kesadaran nasional. Inilah alasan kenapa SI sebagai penggagas nasionalisme di Indonesia yang berlandaskan pada agama Islam.<sup>28</sup> *Kedua*, SI memberikan rakyat Indonesia rasa kebersamaan dan persaudaraan, suatu hal yang tidak pernah mereka dapatkan, terlebih lagi mereka menganggap SI sebagai gerakan yang membebaskan mereka dari penderitaan penindasan. *Ketiga*, SI yang anggotanya terdiri dari daerah-daerah yang ada di Indonesia mampu mengembangkan kesadaran rakyat Indonesia dan semangat nasional yang mendorong terbentuknya suatu ikatan bangsa, yaitu bangsa Indonesia dibawah ikatan agama. *Keempat*, SI dengan kegiatannya mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi rakyat melalui tuntutan-tuntutan pada pemerintah, walaupun hasilnya tidak menumbuhkan hasil yang memuaskan setidaknya dari sisi postifnya yaitu semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap situasi hubungan kolonial yang ada di Indonesia.

Gerakan-gerakan ini dalam pandangan Achmad Musyahid merupakan hasil refleksi kesadaran umat Islam terhadap kebekuan dan kejumudan sejarah Islam selama beberapa abad lamanya yang dengan sendirinya menimbulkan kegelisahan intelektual dikalangan kaum Muslim.<sup>29</sup>

b. Gerakan dakwah Ekonomi, Pendidikan dan Politik.

Pada penyelenggaraan Majelis Taklim (MT) ke 40 yang diselenggarakan di Bandung pada 24-27 November 2015 memutuskan bahwa SI melakukan gerakan yang telah dilakukannya pada tahun 1905 yang artinya SI akan kembali ke khittah awal organisasi yang bergerak dibidang dakwah ekonomi, pendidikan dan politik. Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi sekarang ini mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat tampaknya semakin tinggi. Keputusan kembali ke khittah menjadi suatu keharusan yang ditempuh oleh SI, dengan menempatkan gerakan ekonomi kaumatan menjadi utama harus diejawantahkan secara konkrit dan berkesinambungan<sup>30</sup>, artinya SI akan mengambil jarak dari politik praktis dan akan fokus kepada pengembangan organisasi dan dakwah ekonomi beserta aspek-aspek turunannya seperti pendidikan dan politik akar rumput.

Dengan gerakan SI tersebut memberikan suasana keormasan masyarakat Islam yang beragam. Mengingat bahwa oramas-ormas Islam yang lain sering tergerus oleh pusaran politik dan stagnasi dalam memanifestasikan nilai ajaran Islam terhadap momentum-momentum yang lebih realistis. SI memiliki perbedaan dengan ormas lainnya dikarenakan titik fokusnya kepada persoalan pengembangan masyarakat lewat jalur perdagangan dan ekonomi, namun bukan berarti menaggalkan sisi sosial dan budaya lainnya.

Sehingga rapat pleno DPP SI yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2016 di Jakarta telah menetapkan kebijakan yang disebut dengan Catur Program Syarikat Islam. Catur program ini sebagai landasan dan arahan gerak perjuangan SI sejak tahun 2015. Catur program ini terdiri atas 4 hal, yaitu: 1) Konsolidasi Organisasi, 2) Pemberdayaan Ekonomi, 3) Tata Kelola Pendidikan, 4) Siyasah. Yang kemudian dibahas secara detail serta disosialisasikan ke utusan wilayah-wilayah dan cabang-cabang seluruh Indonesia pada Mukernas 1 SI pada tanggal 19-21 Mei 2017 di Bogor Jawa Barat dan berlaku selama satu periode DPP SI 2015-2020.

<sup>28</sup>Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia*, h. 65

<sup>29</sup>Achmad Musyahid, "Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulsen)", *Jurnal Hukum Diktum*10, no. 2 (Juli 2012), h. 141.

<sup>30</sup>Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto & Ahmad Rofik, "Gerakan Syarikat Islam Kembali ke Khittah Tahun 1905", *Jurnal Politik Profetik*8, no. 2 (2020), h. 225.

Gugun Wardiono, Bowo Sugianto dan Ahmad Rofiq mengatakan dalam tuisannya bahwa, Catur program merupakan program prioritas yang akan dilakukan oleh SI, yang dimana ini merupakan respon terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya umat Islam, yaitu pada permasalahan pendidikan, ekonomi, dan politik. Maka dari itu program ini sebagai upaya untuk membangkitkan kembali SI pada masa kejayaannya, tapi di sisi lain sebagai bentuk keterlibatan SI untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

#### 1) Konsolidasi Organisasi

Konsolidasi organisasi SI merupakan konsolidasi menyeluruh yang mencakup ideologi, kesamaan visi dan pemahaman serta program aksi. Konsolidasi dan penataan bangunan organisasi SI menjadi hal yang paling mendasar, karena jika ini tidak bekerja akan berpengaruh terhadap kinerja SI di wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang notabennanya merupakan kepanjangan tangan dari DPP SI dalam menjalankan program yang lainnya khususnya dibidang ekonomi dan pendidikan.<sup>31</sup>

#### 2) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dibidang ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan SI pada fitrahnya sebagaimana awal organisasi ini didirikan, yakni perhimpunan para pedagang yang digerakkan oleh para saudagar-saudagar muslim, sehingga upaya ini untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat Islam. Sehingga DPP SI telah menetapkan program-program yang diantaranya, *Pertama*, pengembangan ekonomi kaum lemah. *Kedua*, membangun dan mengembangkan sistem jaringan dan sumber-sumber ekonomi dengan mendorong kader SI untuk aktif membangun koperasi di lingkup internal maupun eksternal. Program ini dilakukan dalam dua bentuk, yang pertama, perdagangan kecil. Perdagangan kecil ini berkaitan dengan jaringan ekonomi yang ada di masyarakat.

#### 3) Tata Kelola Pendidikan

Program-program di bidang pendidikan ini kemudian disusun dalam program aksi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP SI di Jakarta. Program-program tersebut di antaranya; *Pertama*, misi Syarikat Islam dalam kurikulum sekolah Kaum Syarikat Islam. Sistem pendidikan SI hadir berdasarkan pokok-pokok pikiran Program Asas dan Program Tandhim. Penyelenggaraan pendidikan disini tidak hanya soal gedung, sarana belajar dan kelulusan siswa saja. Akan tetapi, SI juga memadukan model pendidikan yang mengintegrasikan partisipasi kaum seperti ruang diskusi kajian peradaban/ kebudayaan, majelis taklim, ruang bermain anak, taman bacaan, dan sentra kreativitas anak dan remaja.<sup>32</sup>

*Kedua*, majelis pendidikan professional. *Ketiga*, penertiban aset lembaga pendidikan. Dalam upaya membangun kembali pendidikan maka penertiban dan kepemilikan aset-aset yang merupakan harta kekayaan SI wajib di tata kembali agar tetap menjadi aset milik SI.

#### 4) Siyasah

Program ini kader-kader SI diarahkan untuk menghidupkan kembali kursus-kursus kader disemua jenjang kepengurusan dan organisasi serumpun, sehingga diharapkan menciptakan kader-kader yang unggul dalam hal kepemimpinan dan siap untuk melayani kepentingan masyarakat agar tercapai kemandirian dan kesejahteraan ummat. Pemimpin yang mengedepankan etika politik tinggi sehingga mampu membawa perubahan dan pengaruh terhadap partai politiknya masing-masing, bahwa esensi politik pada esensinya adalah pelayanan publik.

### 2. Front Pembela Islam

#### a. Gerakan Nasional Anti Maksiat

<sup>31</sup>Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto & Ahmad Rofik, "Gerakan Syarikat Islam Kembali ke Khittah Tahun 1905", *Jurnal Politik Profetik*8, no. 2 (2020), h. 225.

<sup>32</sup>Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto & Ahmad Rofik, "Gerakan Syarikat Islam Kembali ke Khittah Tahun 1905", *Jurnal Politik Profetik*8, no. 2 (2020), h. 237

Gerakan Nasional Anti Maksiat merupakan suatu program nasional yang cetuskan oleh FPI, program ini juga sudah menjadi perwujudan dari perjuangan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk penerapan syariat Islam secara kaffah, hal ini selaras dengan visi dan misi FPI yang bermaksud untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar disegala sektor kehidupan.<sup>33</sup> Habib Rizieq mengatakan dalam bukunya bahwa, ada beberapa faktor mengapa FPI mencetuskan gerakan nasional anti maksiat,<sup>34</sup> yaitu:

- 1) Kemaksiatan telah merajalela secara terang-terangan di hampir seluruh sektor kehidupan bangsa.
  - 2) Kemaksiatan telah merasuk keseluruhan lapisan masyarakat secara membabi buta
  - 3) Kemaksiatan telah berakar dan membudaya sehingga menjadi hal yang sudah biasa, lumrah dan lazim.
  - 4) Kemaksiatan telah mambungkus diri dengan kemas sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan kesejahteraan.
  - 5) Kemaksiatan telah memiliki jaringan yang menggurita dalam tubuh eksekutif, legislatif dan yudikatif.
  - 6) Kemaksiatan telah membangun kekuatan legalitas hukum secara formal dan non formal.
  - 7) Kemaksiatan telah menjadi gerakan sistematis untuk merusak bangsa dan negara
  - 8) Kemaksiatan telah berubah wujud menjadi sindikat mafia yang sangat berbahaya.
  - 9) Kemaksiatan telah menguat secara struktural dan bergerak secara brutal
  - 10) Kemaksiatan telah mengundang berbagai bencana dan malapetaka di negeri ini.
- b. Aksi Bela Islam (ABI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)

Aksi Bela Islam (ABI) adalah gerakan yang terjadi pada tahun 2016-2017 dengan aksi beberapa gelombang, aksi ini dipelopori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang dimana inisiator dari gerakan ini adalah FPI. ABI ini merupakan peristiwa ketika umat Islam berkumpul di ibukota Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi demonstrasi. Dalam aksi itu terdapat beberapa tuntutan kepada negara agar dapat mengadili Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atas dugaan penodaan terhadap agama saat berpidato di kepulauan seribu, Jakarta pada tanggal 27 September 2016.

## Kesimpulan

Syarikat Islam (SI) merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta oleh pengusaha batik yang bernama Haji Samanhudi dengan nama awal organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI). Tujuan terbentuknya organisasi tidak lain karena ingin melawan kolonial Belanda dan pedagang asing seperti pedagang Tionghoa dan Arab. Sedangkan Front Pembela Islam didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di pondok pesantren Al-Umm, kampung Utan, Ciputat Jakarta Selatan oleh sejumlah Haba'ib, Ulama, Mubalig, serta aktivis muslim dan umat Islam. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habib Rizieq Shihab. Tujuan terbentuknya organisasi ini ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia karena penderitaan yang dirasakan oleh pemerintahan orde baru yang mengakibatkan banyaknya bentuk kemaksiatan yang terjadi dan karena adanya tanggung jawab umat Islam dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bentuk pemikiran SI mempunyai sandaran yang ideologis dengan sebutan Sosialisme Islam yang prakarsai oleh H.O.S Tjokroaminoto dalam perjuangannya melawan kapitalisme dan kolonialisme bangsa asing di Indonesia. Sedangkan FPI dalam memiliki pandangan amar ma'ruf nahi munkar dalam setiap

<sup>33</sup>Sri Sultarini & Riska Angriani, "Peran Organisasi Islam Dalam Pembangunan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Publikasi*, no. 1, (13 Oktober 2020), h. 15.

<sup>34</sup>Habib Muhammad Riziq Shihab, *Dialog FPI: amar ma'ruf nahi munkar*, h. 418

perjuangannya dalam menumpas segala bentuk kemaksiatan yang terjadi di tangan masyarakat Indonesia dan terlebih telah merasuki perilaku para penguasa negara. SI dalam perjuangannya telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan keagamaan di Indonesia, seperti membangkitkan gerakan nasionalisme yang berlandaskan pada ikatan keagamaan terhadap kolonial bangsa asing di Indonesia agar dapat menentukan nasibnya sendiri lewat pemerintahan yang independen tanpa intervensi dari mana pun. Selain itu SI juga telah melakukan berbagai macam program-program kerakyatan lewat kebijakannya mengenai dakwah ekonomi, pendidikan dan siyasah. Sedangkan FPI dalam rekam jejaknya telah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk Aksi Nasional Anti Maksiat sebagai upaya menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sehingga kemaksiatan dapat dibendung lewat aksi ini. Selain dari itu FPI juga telah menggelar Aksi Bela Islam (ABI) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) atas bentuk protes terhadap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang telah dinyatakan telah melakukan penghinaan terhadap Islam termasuk para Ulama lewat fatwa dari MUI sehingga memunculkan aksi demonstrasi umat Islam yang sangat besar.

## Daftar Pustaka

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Azizy, A. Qodry, "Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahanya di Indonesia". Diklat, Semarang Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1982
- Amelz. *H.O.S Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya, Jilid II*. Djakarta: Bulan Bintang, 1952
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khusus Al-Balwā." *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–2765.
- Bakry, Muammar, dkk. *Konstruksi Islam Moderat "Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanis, dan Universalitas Islam"*. Yogyakarta: Lembaga Ladang kata, Januari 2018.
- Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh dalam Tinjauan Maqashid al-Din". *Jurnal Al-Adalah* 10, No. 3, (Januari 2012), h. 255-266.
- Djaelani, Anton Timur. *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2017.
- Ghani, Roeslan A. *Politik dan Ilmu*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1902
- Hanifah. "Perjuangan Sarekat Islam Dalam Melawan Kolonialisme Belanda di Sumenep Madura 1913-1920". *Skripsi*. Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2003
- Jahroni, Jajang dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kahin, George Mc Turnan. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 1995.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
- Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Korver, A.P.E. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Musyahid, Achmad. "Perkembangan Pemikiran Filsafat Dalam Jurispundensi Islam" *Jurnal Hukum Diktum*8, no. 1 (Januari 2010), h. 47-54.
- Musyahid, Achmad. "Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulsen)", *Jurnal Hukum Diktum*10, no. 2 (Juli 2012), h. 139-147.
- Nasihin, *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012.
- Ng, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Shihab, Muhammaad Rizieq. *Dialog FPI-Amr Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Ibnu Saidah, 2008.
- Sultarini, Sri & Riska Angriani, "Peran Organisasi Islam Dalam Pembangunan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Publikasi*, no. 1, (13 Oktober 2020): h. 1-108
- Tjokroaminoto, H.O.S. *Islam dan Sosialisme*. Djakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indoneisa, 1963.
- Wardiono, Gugun, Bowo Sugiarto dan Ahmad Rofik, "Gerakan Syarikat Islam Kembali Ke Khittah Tahun 1905", *Jurnal Politik Profetik*8, no. 2 (2020): h. 218-239.
- Wikipedia,"Front Pembela Islam" [https://id.wikipedia.org/wiki/Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam).
- Yusuf, Moh. "Sarekat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia". *Skripsi*. Surabaya Fak. Adab IAIN Sunan Ampel, 1987.